

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pengangguran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sakti dan rekan (2023), pengangguran dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu orang yang menganggur secara terpaksa dan orang yang menganggur secara sukarela. Orang yang menganggur secara terpaksa merujuk pada individu atau kelompok individu tersebut tidak mendapat pekerjaan meskipun mereka ingin menerima pekerjaan dengan gaji yang cenderung rendah dari seharusnya. Sementara orang yang menganggur secara sukarela mengacu pada individu atau kelompok individu yang memilih tidak bekerja daripada mendapatkan pekerjaan dengan gaji di bawah standar yang mereka inginkan.

Pengangguran merujuk kepada individu yang tidak sedang bekerja secara penuh, baik itu karena sedang dalam proses mencari pekerjaan, aktif berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan, atau bekerja dengan kurang dari 2 hari dalam satu minggu. Kondisi orang yang menganggur umumnya terjadi ketika kuantitas individu yang mencari pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah posisi pekerjaan yang tersedia dan bisa menampungnya. Fenomena orang yang menganggur sering menjadi permasalahan dalam konteks ekonomi karena dapat mengurangi pendapatan dan produktivitas dari masyarakat, serta berpotensi menyebabkan masalah sosial dan kemiskinan lainnya (Hartono, 2023).

Pengangguran pada dasarnya mencakup konsep kehilangan produksi dan penderitaan bagi individu yang tidak bekerja, serta merupakan pemborosan sumber daya ekonomi. Selain menurunkan produksi, pengangguran juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dalam bentuk kompensasi bagi orang yang menganggur dan program kesejahteraan. Fenomena seperti ini dapat dilihat di beberapa negara yang maju dan pemerintah menyediakan bantuan dan bertanggung jawab untuk individu yang menganggur (Susilowati et al., 2022).

Menurut teori, tingkat pengangguran bisa diukur dengan mempertimbangkan kuantitas individu yang menganggur dengan kuantitas dari angkatan kerja, diungkapkan dalam bentuk persentase. Penurunan *income* dan ketiadaan penghasilan mengakibatkan pengangguran harus mengurangi belanja konsumsi mereka, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Pengangguran yang berlanjut juga bisa menyebabkan dampak psikis yang

merugikan bagi individu yang menganggur dan keluarga mereka. Tingkat orang menganggur yang terlalu besar juga bisa memicu gangguan keamanan, sosial, dan politik, yang mengganggu pembangunan dan pertumbuhan dalam ekonomi, yang akibatnya berjangka panjang berupa penurunan PDB dan *income* per kapita dalam suatu negara. (Mankiw & Rashwan, 2018).

2.1.1 Jenis-jenis Pengangguran

1. Pengangguran menurut penyebabnya

Jenis orang yang menganggur berdasarkan klasifikasi ini bisa dibedakan menjadi empat antara lain :

- a. Pengangguran secara normal atau friksional merupakan bentuk pengangguran karena munculnya perubahan akibat dalam persyaratan pekerjaan, yang dapat terjadi sejalan dengan evolusi atau pergerakan ekonomi yang sedang berlangsung. Jenis pengangguran seperti ini dapat terjadi ketika banyak orang yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dari profesi yang satu ke profesi yang lain, atau sebagai bagian dari berbagai tahap siklus di dalam kehidupan yang beragam (Ekasari, 2023).
- b. Pengangguran secara struktural adalah bentuk pengangguran karena struktur di dalam pasar tenaga kerja yang terjadi perubahan, yang mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja yang tersedia dan yang dibutuhkan. Penyebab dari jenis pengangguran ini adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja. (Ekasari, 2023).
- c. Pengangguran siklikal yang ada dalam perekonomian tidak selalu stabil. Terkadang, permintaan agregat meningkat, mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi. Ini mengakibatkan perekrutan lebih banyak pekerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Namun, pada waktu lain, permintaan agregat menurun secara signifikan. Penurunan ini menjadikan perusahaan mengurangi jumlah orang yang bekerja atau bahkan menghentikan usahanya, sehingga menyebabkan peningkatan orang yang menganggur. Jenis pengangguran ini disebut pengangguran siklikal (Ekasari, 2023).
- d. Pengangguran teknologi merujuk pada situasi di mana penggunaan mesin dan bahan kimia menggantikan tenaga manusia dalam berbagai kegiatan. Misalnya, penggunaan racun untuk mengendalikan gulma telah mengurangi kebutuhan akan pekerja yang membersihkan kebun, lahan pertanian, dan sawah. Begitu pula dengan penggunaan mesin untuk melubangi lahan, membersihkan area, memotong rumput, dan mengumpulkan hasil pertanian telah mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja

manusia. Dalam berbagai pabrik, keberadaan robot dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia. Pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan penggunaan mesin tersebut dikenal sebagai pengangguran teknologi (Ekasari, 2023).

2. Pengangguran berdasarkan ciri-cirinya:

- a. Pengangguran secara terbuka terjadi ketika pertumbuhan dari kuantitas angkatan kerja melebihi pertambahan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah individu akibat sulitnya mendapat pekerjaan. Dalam jangka yang panjang, hal ini menyebabkan mereka menganggur karena tidak adanya pekerjaan yang tersedia untuk mereka (Hasyim, 2017).
- b. Pengangguran yang tersembunyi merujuk pada situasi di mana para pekerja memiliki produktivitas yang cenderung kurang sehingga mereka dapat dihapus dari pekerjaan mereka tanpa menurunkan produksi secara signifikan bagi pegawai, buruh, atau petani (Hasyim, 2017).
- c. Pengangguran musiman terutama ditemukan dalam sektor pertanian dan perikanan. Misalnya, saat musim kemarau, petani sawah tidak dapat bekerja di ladang karena kurangnya pasokan air. Selain itu, setelah panen, para petani memiliki waktu luang sebelum musim tanam berikutnya. Jika selama periode ini mereka tidak memiliki pekerjaan tambahan, mereka akan mengalami pengangguran musiman (Hasyim, 2017).
- d. Setengah menganggur merujuk pada fenomena di mana terjadi migrasi cepat dari desa yang berpindah ke kota. Tidak semua individu yang bermigrasi ke kota mampu dengan mudahnya untuk mendapatkan pekerjaan, akibatnya individu tersebut terpaksa menjadi pengangguran. Selain itu, ada juga individu yang menganggur secara tidak total, namun waktu mereka bekerja tidak penuh, dengan jam kerja yang jauh di bawah standar normal. Pekerjaan yang mereka lakukan mungkin hanya satu hingga dua hari dalam seminggu dan dalam sehari mereka melakukan pekerjaan dengan waktu satu hingga empat jam (Hasyim, 2017).

2.1.2 Pengaruh dari Pengangguran

Orang yang menganggur dalam roda perekonomian dapat menghasilkan konsekuensi negatif, baik bagi perekonomian tersebut maupun bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Susilowati et al., 2022).

1. Pengaruh pengangguran terhadap perekonomian

Tingkat pengangguran tinggi menghambat pencapaian tujuan kemakmuran masyarakat, yang tercermin dalam pengaruh ekonomi negatif yang dihasilkan oleh masalah pengangguran.

Dampak-dampak negatif orang yang menganggur terhadap perekonomian:

Pertama, orang yang menganggur menghambat masyarakat dalam mencapai nilai kesejahteraan yang optimal. Ketidaktersediaan pekerjaan mengakibatkan output aktual di bawah potensial, sehingga nilai kemakmuran yang diraih masyarakat menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Kedua, orang yang menganggur mengakibatkan penurunan *income* pajak pemerintah. Tingkat ekonomi yang rendah sebagai akibat dari pengangguran akan mengurangi pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah, sehingga mengurangi kemampuannya dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Ketiga, orang yang menganggur dengan jumlah yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan dari ekonomi. Orang yang menganggur menciptakan ketidakseimbangan dalam sektor swasta, dimana kelebihan tenaga kerja seringkali disertai dengan kapasitas dari mesin perusahaan yang berlebih. Hal ini menghambat motivasi perusahaan dalam melakukan investasi untuk masa depan, sementara pengangguran yang disebabkan oleh kelesuan aktivitas perusahaan mengurangi keuntungan yang diperoleh.

2. Dampak orang yang menganggur terhadap individu dan masyarakat

Dampak negatif dari orang yang menganggur terhadap individu dan masyarakat meliputi (Susilowati et al., 2022):

Pertama, pengangguran menyebabkan hilangnya pekerjaan dan *income*.

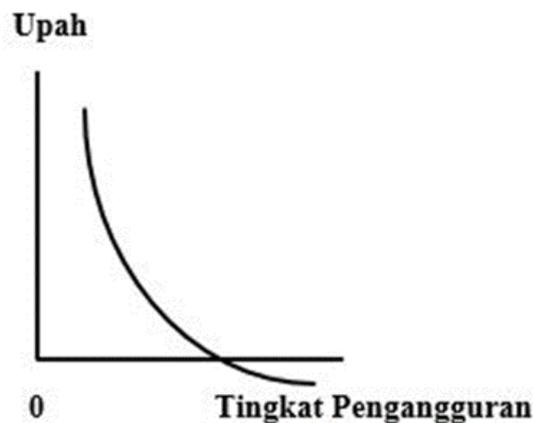
Kedua, orang yang menganggur mengakibatkan keterampilan orang tersebut hilang atau menurun. Keterampilan yang dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan melalui praktik dan penggunaan secara aktif.

Ketiga, orang yang menganggur dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Penurunan aktivitas ekonomi dan tingkat pengangguran yang cenderung tinggi dapat memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

2.2 Teori Phillips

Kurva Phillips adalah representasi dari hubungan antara tingkat pengangguran dengan kenaikan upah atau tingkat harga. Kurva ini dinamai oleh orang yang kali pertama melakukan

studi dalam bidang upah dan tenaga kerja. Pada tahun 1958, A.W. Phillips, seorang profesor di London School of Economics, menerbitkan sebuah studi yang meneliti karakteristik upah yang mengalami perubahan di Inggris selama tahun 1861-1957. Hal tersebut menginvestigasi hubungan antara tingkat orang yang menganggur dan naiknya upah. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa terdapat korelasi invers antara tingkat upah dan tingkat pengangguran. Saat tingkat dari pengangguran tinggi, naiknya tingkat upah cenderung rendah, dan sebaliknya, saat tingkat dari pengangguran rendah, naiknya tingkat upah cenderung tinggi (Hartono, 2023).



Sumber : <https://rowlandpasaribu.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/03/pertemuan-10-inflasi-dan-pengangguran.pdf>

Gambar 2.1 Kurva Phillips

Ketika tingkat dari pengangguran naik, tingkat upah akan turun, dan sebaliknya, ketika tingkat dari pengangguran turun, tingkat dari upah akan naik (Hasyim, 2017).

Kurva Phillips sebenarnya merupakan bentuk yang lain dari kurva penawaran agregat. Dalam kurva penawaran agregat berjangka pendek, ada hubungan yang positif antara *output* dan harga (Hasyim, 2017).

2.3 Tingkat Pengangguran

Pengangguran sering terjadi pada kelompok usia muda yang memiliki latar belakang pendidikan. Mankiw (2009) menyatakan bahwa pengangguran terjadi karena kurangnya kesesuaian antara perencanaan dalam pendidikan dengan kebutuhan kesempatan kerja yang ada, yang merupakan faktor inti dalam jenis pengangguran seperti ini. Di Indonesia, lembaga pendidikan umumnya mempersiapkan siswa sebagai individu yang mencari pekerjaan, bukan sebagai individu yang menciptakan atau memperluas lapangan kerja. Meskipun demikian, agar menjadi lulusan yang matang dan siap bekerja, mereka memerlukan keterampilan tambahan

baik *softskill* maupun *hardskill*. Di sisi lain, para lulusan yang menganggur cenderung memilih pekerjaan formal dan mengharapkan fasilitas yang memadai serta upah yang tinggi dan posisi yang baik secara langsung.

2.4 Upah

Menurut Pasal 1 Ayat 30 dalam Bab 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang biasa disingkat sebagai UUKK, upah merujuk pada hak yang didapatkan oleh pekerja atau buruh dalam wujud uang sebagai imbalan dari pencipta pekerjaan, sesuai dengan isi perjanjian kerja, ketentuan atau kesepakatan secara hukum. Termasuk dalam upah adalah tunjangan bagi tenaga kerja atau buruh beserta keluarganya karena pekerjaan yang telah dilakukan atau akan dilakukan (Adisu, 2008).

(Adisu, 2008) menyatakan bahwa orang yang bekerja memiliki hak untuk menerima gaji dari pemberi kerja, juga harus dipatuhi oleh pemberi kerja dan dijamin oleh undang-undang. Masing-masing pekerja atau buruh memiliki hak untuk memperoleh *income* yang mencukupi untuk pemenuhan hidup yang layak secara manusiawi.

2.4.1 Macam-macam Upah

Macam-macam jenis upah yaitu upah tidak tetap, upah tetap, upah harian, dan upah borongan (Adisu, 2008).

a. Upah Tidak Tetap

Upah jenis ini merupakan imbalan yang diterima oleh buruh atau pekerja secara tidak teratur untuk suatu pekerjaan.

b. Upah Tetap

Upah jenis ini merupakan imbalan yang diterima oleh buruh atau pekerja secara reguler untuk pekerjaan yang telah dilakukan secara teratur.

c. Upah Harian

Upah harian yaitu gaji yang diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada pekerja atas pekerjaan yang diselesaikan dalam satu hari kerja atau berdasarkan persentase kehadiran selama satu hari.

d. Upah borongan

Upah jenis ini merupakan pembayaran yang diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk paket, diukur berdasarkan volume hasil kerja, atau tergantung pada faktor-faktor seperti cuaca atau musim dalam melakukan pekerjaan.

Bagaimanapun juga, hak seorang pekerja terhadap gaji yang diberikan tidak boleh di bawah nilai minimum yang telah ditetapkan sebagai upah minimum. Upah seperti ini merupakan jumlah minimum yang harus dibayarkan setiap bulannya kepada pekerja, termasuk upah pokok dan tunjangan-tunjangan tetap (Adisu, 2008).

2.4.2 Kebijakan Upah di Perusahaan

Ketika menentukan upah bagi pekerja, seringkali terjadi konflik antara dua kepentingan yang bertentangan, yaitu orientasi pada aspek manusiawi dan orientasi pada produk (Adisu, 2008). Orientasi pada aspek manusiawi, yang diprioritaskan oleh pekerja, menginginkan kesejahteraan dengan bentuk upah yang tinggi atau cukup, sementara pihak dari pemberi kerja selalu menekankan produktivitas yang tinggi, yaitu produksi sebanyak-banyaknya.

2.4.3 Acuan untuk Menetapkan Upah

Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan pemberian upah (Adisu, 2008):

- a. Memperhitungkan dampak dari biaya operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan secara keseluruhan, termasuk hubungannya dengan program-program seperti kerja lembur, pensiun, pesangon, THR, dan JAMSOSTEK.
- b. Mengikuti peraturan hukum yang berlaku.
- c. Memperhitungkan dua aspek, antara lain aspek teknis dan ekonomis.

2.4.4 Hak Karyawan atas Upah

Adisu (2008). menjelaskan bahwa masing-masing pekerja memiliki hak dalam menerima upah atas pekerjaan mereka. Hak ini terjadi selama ada hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, dan berakhir ketika hubungan kerja tersebut berakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Adisu (2008) menjelaskan bahwa buruh atau pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan, terutama minimal sebesar upah minimum. Pemberi kerja dilarang membayar gaji yang lebih sedikit daripada upah minimum, seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat 1. Jika pengusaha melanggar ketentuan ini, maka klaim atas pembayaran sebuah upah oleh buruh atau pekerja, serta segala pembayaran yang didapatkan dari hubungan kerja menjadi

tidak berlaku setelah melewati jangka waktu selama dua tahun sejak hak tersebut muncul, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96.

Adisu (2008) menjelaskan bahwa sebaliknya, buruh atau pekerja yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan akan mengakibatkan dikenakan denda, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96 Ayat 1. Selain itu, seorang pemberi kerja yang secara sengaja menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran upah dapat dikenai denda dengan jumlah tertentu sebagai persentase dari upah buruh atau pekerja, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96 Ayat 2. Prinsip "no work no pay" diterapkan, yang berarti buruh atau pekerja yang tidak melakukan pekerjaan tidak akan mendapatkan upah dari pemberi kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96 Ayat 1.

2.4.5 Struktur dan Skala dalam Upah

Skala dan struktur dalam upah merujuk pada kebijakan dan metode administratif yang membantu dalam menentukan besaran upah pokok yang sesuai dengan bobot dari jabatan yang dipegang. Penyusunan skala upah dan kebijakan struktur bertujuan untuk mencapai pemerataan, sehingga kesenjangan antara pekerja di tingkat atas dan pekerja pada tingkat bawah tidak terjadi. Dalam struktur upah, terjadi pengelompokan jabatan-jabatan yang berbobot sama menjadi satu golongan berdasarkan kondisi dari pasar tenaga kerja (Adisu, 2008).

Dalam penyusunan skala dan struktur upah, perlu memperhatikan aspek teknis yang siap diadopsi serta kemampuan finansial tiap perusahaan. Hal ini bertujuan agar upah yang paling rendah dalam struktur dapat melebihi upah minimum yang ditetapkan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan skala dan struktur upah (Adisu, 2008) :

- a. Berdasarkan rencana pengeluaran operasional perusahaan.
- b. Mengamati penghasilan bersih agar tetap stabil, setidaknya setara dengan upah minimum di suatu provinsi.
- c. Konsekuensi terhadap tunjangan pensiun, kontribusi asuransi ketenagakerjaan, dan program pension.
- d. Pelunasan Pajak Penghasilan.
- e. Kondisi dari Pasar kerja.

2.5 Kesempatan kerja

2.5.1 Pasar Tenaga Kerja

Pasar untuk angkatan kerja adalah sekelompok individu yang merupakan angkatan kerja yang tersedia untuk mengisi posisi pekerjaan yang tersedia. Pasar tenaga kerja merupakan sumber daya bagi perusahaan dalam merekrut tenaga kerja.

Terdapat keterkaitan beberapa konsep yang ada dengan pasar tenaga kerja, antara lain (Hanggraeni, 2012) :

- a. Pasar tenaga kerja berdasarkan profesi merupakan pasar angkatan kerja yang ditentukan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu instansi sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia.
- b. Pasar tenaga kerja berdasarkan geografis mengacu pada pasar angkatan kerja yang dilihat dari perspektif geografis, seperti daerah, wilayah, dan lain-lain
- c. Faktor kualifikasi teknis dan pendidikan memengaruhi pasar angkatan kerja dengan menggambarkan syarat pendidikan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Sebuah perusahaan mungkin memerlukan individu yang memiliki keahlian teknis atau sertifikasi di bidang tertentu, sehingga pekerjaan tersebut menginginkan gelar atau sertifikat yang sesuai.

Penyedia angkatan kerja merupakan kelompok individu yang merespons *demand* untuk mempekerjakan seseorang di suatu instansi. Setiap perusahaan membutuhkan angkatan kerja yang terampil dan memiliki kualitas yang baik. Serikat pekerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *supply* angkatan kerja yang diperlukan oleh organisasi (Hanggraeni, 2012).

Kebutuhan akan angkatan kerja yang memiliki pemahaman tentang IPTEK menghasilkan beberapa pengaruh, antara lain:

1. Perusahaan melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dengan upaya perekrutan, pelatihan, dan pendidikan.
2. Dampak dari perdagangan internasional, otomatisasi, relokasi pabrik, dan ekspansi perusahaan berakibat pada perpindahan buruh serta terbentuknya kelompok angkatan kerja yang tidak terserap dalam suatu daerah, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan kekurangan angkatan kerja di daerah lain.

2.6 Pendidikan

Pendidikan formal merupakan sistem pendidikan yang teratur dan memiliki jenjang yang mencakup tahapan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan tidak formal, di

sisi lain, merupakan jenis pendidikan yang berada di luar kerangka pendidikan formal dan bisa diselenggarakan secara bertahan dan terstruktur (BPS, 2023).

2.6.1 Bentuk dan Jenis Kelembagaan dalam Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional diselenggarakan melalui berbagai lembaga edukasi, baik diselenggarakan dengan bentuk kelompok belajar maupun sekolah, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Atau, pendidikan nasional dapat direalisasikan melalui jalur informal, nonformal, dan formal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Kadir, 2015).

2.6.2 Jalur Pendidikan

Penyelenggaraan dalam sistem pendidikan nasional diimplementasikan melalui pendidikan informal, nonformal, dan formal. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, disebutkan bahwa pengimplementasian Sisdiknas dilakukan melalui dua jalur, yakni (Kadir, 2015):

1. Jalur pendidikan dalam sekolah

Jalur pendidikan dalam sekolah adalah proses kegiatan edukasi yang dilaksanakan di institusi sekolah dengan serangkaian aktivitas belajar mengajar yang terstruktur dan berkelanjutan, mencakup pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat menengah, hingga pendidikan tingkat tinggi.

Ciri-ciri dari jalur pendidikan secara formal yaitu:

- a. Memiliki karakter formal yang bersifat nasional
- b. Diatur dengan berdasarkan peraturan dari pemerintah
- c. Menyelenggarakan struktur pendidikan yang seragam dan bersifat nasional

2. Jalur Pendidikan di luar sekolah.

Jalur pendidikan luar sekolah merupakan bentuk kegiatan edukasi yang berorientasi pada masyarakat, diselenggarakan di luar lingkungan sekolah melalui aktivitas pembelajaran yang tidak terstruktur dan tidak berkelanjutan, seperti kegiatan kursus, kepramukaan, dan sebagainya. Jalur ini menyediakan peluang bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan aspek sosial, budaya seperti seni dan bahasa, agama, dan keterampilan untuk pertumbuhan individu dan pembangunan komunitas mereka.

Ciri-ciri dari pendidikan di luar sekolah antara lain:

- a. Bersifat tidak formal, yang berarti tidak adanya standar struktur yang seragam secara nasional
- b. Memiliki keberagaman dalam model penyelenggaraan. Dalam konteks ini, pendidikan dalam keluarga adalah bagian dari jalur pendidikan yang ada di luar sekolah dan dilakukan di lingkungan keluarga, yang fungsi intinya adalah untuk memupuk nilai-nilai budaya, agama, keterampilan, dan moral.

Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dalam istilah jalur pendidikan dalam sekolah dan pendidikan di luar sekolah dibedakan menjadi dua kategori, yakni (Kadir, 2015):

1. Jalur pendidikan sekolah untuk pendidikan formal.
2. pendidikan nonformal atau informal untuk jalur pendidikan di luar sekolah

2.6.3 Jenjang Pendidikan

(Kadir, 2015) menjelaskan bahwa jenjang dari aktivitas edukasi merupakan fase dalam proses edukasi yang ditentukan oleh tingkat pertumbuhan peserta didik dalam aktivitas pendidikan serta cakupan dan pendalaman materi pembelajaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Atau, dapat diartikan sebagai tingkat edukasi yang ditetapkan oleh kemajuan dari peserta didik, kemampuan yang akan dikembangkan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Ada 3 jenjang pendidikan di dalam SISDIKNAS yaitu (Kadir, 2015):

1. Jenjang Pendidikan Tingkat Dasar

Pendidikan tingkat dasar dapat diselenggarakan dengan tujuan membangun fondasi yang esensial untuk kehidupan bermasyarakat, termasuk pengetahuan, keterampilan dasar, dan pengembangan sikap. Selain itu, juga memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa agar memenuhi syarat untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah. Maka dari itu, pendidikan tingkat dasar memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan tingkat dasar, dan setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tingkat atas.

2. Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah

Pendidikan Tingkat menengah yang berdurasi tiga tahun setelah pendidikan tingkat dasar, diadakan di SMA (Sekolah Menengah Atas) atau institusi pendidikan setara. Pendidikan tingkat menengah berperan sebagai kelanjutan dan perluasan dari pendidikan dasar. Secara ke bawah, pendidikan menengah melanjutkan dan memperluas cakupan materi pendidikan dasar. Sementara itu, dalam konteks ke atas, pendidikan menengah mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat tinggi atau memasuki dunia kerja.

Pendidikan tingkat menengah terdiri dari lima jenis, yaitu: pendidikan tingkat menengah kejuruan, pendidikan tingkat menengah umum, pendidikan tingkat menengah kedinasan, pendidikan tingkat menengah keagamaan, dan pendidikan tingkat menengah luar biasa.

3. Jenjang Pendidikan Tingkat Tinggi

Pendidikan tingkat tinggi adalah tahap lanjutan dari pendidikan tingkat menengah, yang dirancang untuk mempersiapkan individu agar menjadi bagian di lingkungan masyarakat yang memiliki keterampilan dan kemampuan akademik yang profesional untuk mengaplikasikan, menciptakan atau mengembangkan pengetahuan, seni, bahkan teknologi. Demi tujuan ini, lembaga pendidikan tingkat tinggi menjalankan misi "Tridarma" yang mencakup pengajaran dan edukasi, pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dalam berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari kesatuan pendidikan dalam lingkup nasional.

Pendidikan tingkat tinggi juga berperan sebagai penghubung antara perkembangan global dengan pengembangan budaya nasional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, terselenggaranya pendidikan tingkat tinggi terbuka dan selektif adalah upaya untuk mengikuti perkembangan dari globalisasi budaya agar mendapatkan manfaat bagi pembangunan bangsa dan budaya nasional. Dalam meraih tujuan dan mempertahankan kebebasan akademik, institusi pendidikan tingkat tinggi menerapkan kebebasan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki otonomi dalam pengelolaannya (Kadir, 2015).

2.6.4 Jenis dan Motif dalam Pendidikan Nasional

Program dari pendidikan yang tergolong dalam jalur pendidikan sekolah terdiri atas (Kadir, 2012:221):

1. Pendidikan Umum

Pendidikan umum merupakan jenis edukasi yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa dengan berorientasi pada spesialisasi yang terjadi pada

tahap-tahap akhir dalam edukasi. Pendidikan umum memiliki fungsi sebagai landasan atau dasar bagi jenis-jenis pendidikan yang lain. Pendidikan ini menitikberatkan pada penguasaan keterampilan umum, pemahaman individu, pengembangan potensi diri, kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif, serta kemahiran akademis. Pendidikan umum mencakup jenjang-jenjang seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan perguruan tinggi.

2. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan jenis edukasi yang menyiapkan siswa untuk memasuki bidang pekerjaan khusus, seperti tata boga, kerajinan, teknik, administrasi perkantoran, perhotelan, dan sebagainya. Pendidikan kejuruan berfokus pada penguasaan keterampilan vokasional. Institusi-institusi pendidikan kejuruan termasuk SMK/STM, SMIK, SMTK, SMIP.

3. Pendidikan Iainnya (Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Luar Biasa, Dan Pendidikan Kedinasan).

Pasal 30 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan diatur oleh pemerintah atau kelompok masyarakat yang memeluk agama, sesuai dengan ketentuan hukum. Pendidikan agama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli agama. Pendidikan agama dapat dijalankan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Bentuk pendidikan keagamaan mencakup ajaran diniyah seperti pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang serupa.

Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa adalah jenis pendidikan yang ditujukan khusus bagi peserta didik dengan disabilitas fisik atau mental. Institusi pendidikan untuk ini mencakup Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Untuk persiapan tenaga pengajar, ada Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) yang setara dengan tingkat Diploma III.

Pendidikan Kedinasan

Pendidikan ini adalah jenis lembaga edukasi yang dirancang khusus dalam mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan bagi calon pekerja atau pekerja di suatu lembaga pendidikan di luar departemen atau lembaga pemerintahan. Pendidikan kedinasan bisa mencakup tingkat pendidikan menengah (contohnya, SPK) dan tingkat pendidikan tingkat tinggi (contohnya, IPDN) (Kadir, 2015).

2.7 Minat Bekerja

Minat terhadap pekerjaan merujuk pada kecenderungan yang dimiliki seseorang untuk tertarik pada suatu jenis pekerjaan atau merasakan kesenangan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Minat merupakan dorongan yang mendorong seseorang untuk memberikan perhatian pada orang, hal, aktivitas tertentu, dan menjadi sumber motivasi dalam melakukan apa pun yang mereka inginkan jika memiliki kebebasan untuk memilih, serta kesadaran seseorang terhadap permasalahan, situasi, atau objek yang berkaitan dengan dirinya (Candraning & Muhammad, 2017). Menurut Makabori & Tapi (2019), ada faktor-faktor yang bisa mendorong timbulnya minat yaitu faktor motif sosial, faktor emosional dan faktor yang muncul dari internal seseorang. Faktor-faktor tersebut menimbulkan minat yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Faktor motif sosial, dorongan minat dari diri seseorang dapat dipengaruhi oleh motif sosial, yaitu keinginan agar dikenal dan dihargai oleh lingkungan tempat mereka tinggal.
2. Faktor emosional, merupakan tingkat intensitas perhatian dari seseorang terhadap aktivitas atau objek tertentu.
3. Faktor Kebutuhan internal dapat terkait dengan kebutuhan fisik dan psikis.

Misalnya minat dalam bidang ilmu pertanian adalah dorongan yang mendorong seseorang agar dapat memahami proses mengolah tanaman dan lingkungan pertanian dengan tujuan menciptakan produk yang memiliki keunggulan kompetitif Taufik et al. (2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor sebagai pemicu minat berasal dari dorongan internal dalam diri seseorang, dorongan secara emosional, serta motif dan dorongan sosial. Minat pada seseorang berawal dari dirinya sendiri, kemudian melalui interaksi dengan tempat tinggal sekitarnya, maka individu mengalami dorongan secara emosional dan dorongan sosial.

2.8 Penelitian Terkait

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Arifin & Firmansyah, 2017). Penelitian yang berjudul "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran di Provinsi Banten" bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari edukasi dan peluang kerja terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Data yang dipergunakan adalah data panel dari sumber sekunder selama periode sembilan tahun, mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2011. Metode analisis regresi berganda adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Linggawati & Wenagama, 2022). Penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran Dan Kemiskinan di Kabupaten Karangasem" bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat upah terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Data sekunder berjenis kuantitatif dan kualitatif dari periode 2006 hingga 2020 merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis jalur.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Karisma et al., 2021). Penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Jawa" bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh edukasi terhadap tingkat pengangguran di Jawa serta mengevaluasi pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran di Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta melalui sumber internet untuk melengkapinya. Metode regresi linier berganda adalah Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purnama et al., 2023). Penelitian yang berjudul "Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang" bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh tingkat edukasi terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi sederhana.

Untuk mempermudah dalam mengamati riset terdahulu, dibuatlah ringkasan dalam format berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penulis (Tahun) dan judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	S.Arifin dan F.Firmansyah (2017) Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran di Provinsi Banten	Variabel X, yang terdiri dari Pendidikan dan Kesempatan Kerja, dan variabel Y, yang merupakan Pengangguran, dianalisis menggunakan metode regresi berganda.	Temuan dari penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, sementara kesempatan kerja tidak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.	Variabel X, yang mencakup Pendidikan dan Kesempatan Kerja, dan variabel Y, yang merupakan Pengangguran.	Lokasi Penelitian, Judul Penelitian, dan Metode Penelitian

No	Penulis (Tahun) dan judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
2	N. Linggawati dan I. Wenagama (2022) Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kabupaten Karangasem	Variabel X terdiri dari Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Upah, sementara variabel Y mencakup Pengangguran dan Kemiskinan. Penelitian menggunakan metode analisis jalur.	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat upah memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Kabupaten Karangasem. Selain itu, variabel-variabel tersebut juga memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Variabel jumlah pengangguran berperan sebagai mediator yang mempengaruhi secara tidak langsung hubungan antara tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat upah dengan jumlah kemiskinan di Kabupaten Karangasem.	Variabel X, yang terdiri dari Pendidikan dan Tingkat Upah, dan variabel Y, yang merupakan Pengangguran.	Lokasi Penelitian, Judul Penelitian

No	Penulis (Tahun) dan judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3	A. Karisma, W. Subroto, dan H. Hariyati (2021) Pengaruh Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Jawa	Variabel X terdiri dari Pendidikan dan Investasi, sementara Variabel Y adalah Pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda.	Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa variabel pendidikan dan investasi, khususnya dalam bentuk penanaman modal asing, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Namun, investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di wilayah Jawa.	Variabel X adalah Pendidikan, sedangkan Variabel Y adalah Pengangguran.	Lokasi Penelitian, Judul Penelitian, dan Metode Penelitian
4	J. Purnama, S. Subaheri, dan D. Desmawan (2023) Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang	Variabel X, yang merupakan Pendidikan, dan Variabel Y, yaitu Pengangguran, dianalisis menggunakan metode analisis dengan statistik deskriptif dan analisis dengan regresi sederhana.	Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, terutama bagi lulusan SMA/Aliyah, memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang. Penambahan jumlah lulusan SMA/Aliyah berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang.	Variabel X adalah Pendidikan, sementara Variabel Y adalah Pengangguran.	Lokasi Penelitian, Judul Penelitian, dan Metode Penelitian

Sumber : Data diolah (2023)

2.9 Hubungan Antar Variabel

2.9.1 Pengaruh Pendidikan dengan Tingkat Pengangguran

Education (Pendidikan) berperan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan individu dengan proses kegiatan edukasi yang efektif. Melalui edukasi yang berkualitas, diharapkan dapat menghasilkan SDM yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan untuk mengubah pengetahuan dan perilaku peserta didik sesuai dengan harapan (Mankiw & Rashwan, 2018). Kurangnya kualitas dalam hasil pendidikan dapat mengakibatkan timbulnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena individu yang tidak mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan karena mereka cenderung memilih posisi pekerjaan yang sesuai dengan tingkat edukasi yang telah mereka tempuh.

2.9.2 Pengaruh kesempatan Kerja dengan Tingkat Pengangguran

Pasar untuk tenaga kerja merujuk pada sekelompok individu yang merupakan angkatan pekerja dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk mengisi berbagai posisi dalam pekerjaan. Pasar untuk tenaga kerja dapat dikatakan sebagai sumber daya bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja (Handrian et al., 2020). Ketika pasar tenaga kerja sempit atau ketika perusahaan terbatas dalam menarik tenaga kerja, hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Semakin sedikit peluang kerja yang tersedia, semakin meningkat tingkat pengangguran di kalangan individu yang memiliki pendidikan.

2.9.3 Pengaruh Tingkat Upah dengan Tingkat Pengangguran

Peningkatan upah dapat mengakibatkan naiknya biaya dalam produksi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kenaikan harga barang yang dihasilkan dan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Ketika tingkat pengangguran naik, upah cenderung turun, sedangkan jika tingkat pengangguran menurun, upah cenderung naik (Mankiw & Rashwan, 2018).

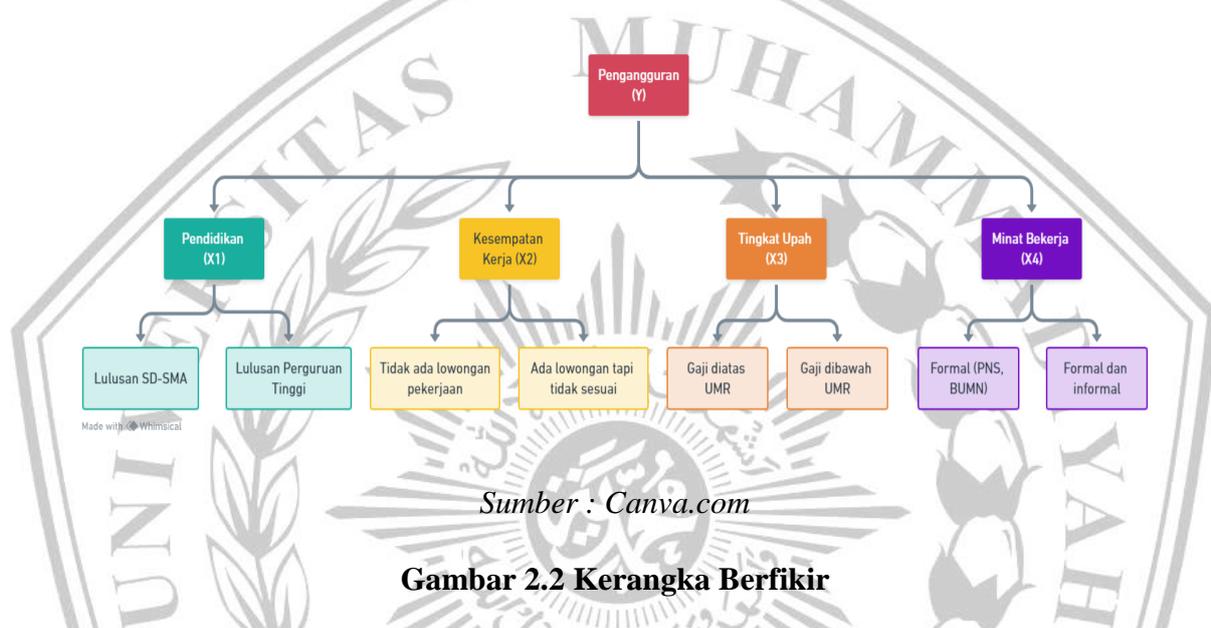
2.9.4 Pengaruh Minat Bekerja dengan Tingkat Pengangguran

Minat dalam bekerja adalah perasaan preferensi, ketertarikan, konsentrasi, ketekunan, usaha, pengaturan perilaku, dan hasil dari interaksi individu dengan pekerjaan tertentu. Minat memiliki pengaruh positif terhadap pencapaian dalam pembelajaran akademik, pengetahuan dalam berbagai domain, dan berbagai bidang studi bagi seseorang. Taufik et al. (2018) menyetujui bahwa minat memiliki pengaruh terhadap tiga aspek kunci pengetahuan individu, yakni tujuan, tingkat pembelajaran, dan perhatian. Berbeda dengan dorongan yang bertindak

sebagai motivasi dalam pengetahuan, maka minat bukan hanya menjadi dorongan pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter dan sikap.

2.10 Kerangka Berfikir

Pendidikan, Kesempatan pekerjaan, gaji, dan minat dalam dunia kerja dapat memengaruhi tingkat pengangguran. Perubahan di dalam faktor-faktor ini dapat berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan oleh individu untuk mencari pekerjaan. Untuk mempermudah penelitian dan menjelaskan konsep dasar dalam penelitian ini, berikut adalah gambaran skematis dari kerangka pemikiran:



Sumber : Canva.com

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

2.11 Pengembangan dalam Hipotesis

Berdasarkan gambaran seperti di atas, maka dirangkai hipotesis sebagai berikut:

H1 = Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

H01 = Pendidikan tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran

H2 = Kesempatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

H02 = Kesempatan kerja tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran

H3 = Tingkat upah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

H03 = Tingkat upah tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran

H4 = Minat bekerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran

H04 = Minat bekerja tidak berpengaruh pada tingkat pengangguran